

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

##### 5.1.1. Klasifikasi Daerah Berdasarkan *Typology Klassen*

Berdasarkan hasil *Typology Klassen* pola dan struktur perekonomian Kecamatan di Kabupaten/kota di Provinsi DIY dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

#### 3. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*)

Dalam kategori ini ada 1 (satu) kabupaten/kota yaitu Kota Yogyakarta yang masuk dalam kategori ini. Kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi ini yang merupakan kabupaten/kota yang relatif maju, tetapi dalam beberapa tahun mengalami pertumbuhan yang relatif kecil.

#### 4. Daerah yang maju, tetapi tertekan (*high income but low growth*)

Tidak ada kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran ini. Meskipun PDRB perkapitanya tinggi, namun pertumbuhan PDRB perkapita kabupaten/kota ini rendah. Kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi ini merupakan kabupaten/kota yang paling rendah keadaannya dibanding yang lain. Dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita relatif lebih kecil dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi DIY.

#### 3. Daerah yang berkembang cepat (*high growth but low income*)

Meliputi 1 (satu) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten/kota yang termasuk berkembang cepat pada umumnya merupakan kabupaten/kota yang sudah maju dari segi pembangunan maupun pertumbuhan yang cepat. Di samping itu kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi ini biasanya merupakan pusat perdagangan dan industri.

#### 4. Daerah yang relatif tertinggal (*low growth and low income*)

Meliputi 3 (tiga) kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi ini merupakan kabupaten/kota yang mempunyai potensi besar, tetapi tidak meratanya (kesenjangan tinggi) pendapatan per kapita atau rendahnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan PDRB perkapitanya yang berada di bawah rata-rata Provinsi DIY.

#### **5.1.2. Ketimpangan Berdasarkan Indeks Kesenjangan Williamson**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kesenjangan Williamson di Provinsi DIY jika dilihat secara rata-rata tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar kabupaten/kota mengalami kesenjangan yang relatif cukup tinggi, dapat dilihat dari nilai kesenjangan yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi DIY selama tahun 2004-2013 bersifat fluktuatif dan cukup tinggi.

#### **5.1.3. Indeks LQ Kabupaten/kota di Provinsi DIY**

Hasil analisis Indeks LQ rata-rata  $LQ=1$  berarti daerah kabupaten/kota yang terjadi di Provinsi DIY mempunyai sektor yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan. Nilai LQ tertinggi adalah Kabupaten Bantul, sedangkan nilai LQ terendah adalah Kabupaten Sleman.

## 5.2. Saran

5.2.1. Dalam mengambil kebijakan pembangunan, Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi DIY harus memiliki strategi yang tepat antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan antar daerah diperlukan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi DIY agar perencanaan pembangunan diprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal.

5.2.2. Pada daerah yang relatif tertinggal diharapkan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Untuk daerah yang berkembang cepat dan maju, harus dikelola dengan baik agar dapat lebih meningkat. Perlu dilakukan usaha-usaha untuk mengembangkan potensi yang ada, antara lain pembudidayaan, hasil alam, kerajinan, dll.

5.2.3. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kesenjangan pendapatan perlu diketahui secara mendasar, seperti distribusi sumber daya dan aliran modal yang tidak merata. Distribusi yang lebih merata perlu diupayakan ke daerah yang kurang berkembang, seperti distribusi sumber daya dan investasi. Investasi salah satunya bisa dengan penyediaan sarana publik dan lainnya.

5.2.4. Untuk mengembangkan daerah yang kurang berkembang. Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi DIY dapat melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mengelola potensi daerah yang ada. Dengan memberikan subsidi, masyarakat dapat berkreasi mengelola potensi wilayah.